

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dapat berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penyajian penelitian terdahulu dapat memberikan referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Hasil penelitian Fauzan Ghazi Alauddin (2021) pada penelitiannya yang berjudul **“Perpindahan Ibukota Negara dan Pemerataan Pembangunan Antar Daerah”** menjelaskan bahwa ada tiga inti yang harus diperhatikan dalam menganalisis pembangunan di daerah yaitu pertama, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah; kedua, Peningkatan pendapatan per kapita; dan ketiga, pengurangan kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada tiga poin pembahasan yaitu keterkaitan perpindahan ibu kota dengan prinsip ekonomi politik, dampak keputusan perpindahan ibukota terhadap pembangunan di Kalimantan dan fokus berikutnya yaitu perbedaan pembangunan antara DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Penelitian menemukan bahwa untuk pada poin yang pertama yaitu keterkaitan perpindahan Ibu kota dengan prinsip ekonomi bergantung pada daerah masing-masing dengan pengelolaan yang maksimal dapat menciptakan pemerataan pembangunan antara daerah dan kemampuan daerah dalam melaksanakan proses pembangunannya. Dampak Kalimantan sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) yaitu dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita serta penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan selain itu dengan Kalimantan Timur sebagai ibu kota tentu dapat mendorong perdagangan antarwilayah di Indonesia juga merangsang investasi di sekitar provinsi ibukota. Perbedaan Kalimantan Timur dan DKI Jakarta dari segi ekonomi Kalimantan Timur jauh berada pada DKI Jakarta namun untuk segi sosial tidak terpaut jauh sehingga disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur lebih rendah dari pada masyarakat DKI Jakarta (Alauddin, 2021).

Dalam penelitian Muhammad Taufiq (2020) yang berjudul **“Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi”** menjelaskan bahwa pemerataan ekonomi dengan negara kepulauan merupakan suatu tantangan yang

rumit dan kompleks bagi Indonesia. Dengan melihat permasalahan yang ada di Jawa khususnya Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya terjadi over populasi, kemacetan, polusi, minim ketersediaan air bersih dan masalah ekonomi lainnya menjadi sebab perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. selain itu dengan perpindahan IKN di Kalimantan Timur menjadi adanya pusat pertumbuhan nasional baru dengan desain yang berkembang guna untuk menjadi tonggak perekonomian baru selain Jakarta. Alasan perpindahan ibu kota negara guna untuk pemerataan pembangunan dan pemisahan pusat pemerintahan. Dengan permasalahan latar belakang di atas oleh beberapa negara, penulis menganggap bahwa perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tujuan mendongkrak perekonomian wilayah bagian Negara dinilai tepat dikarenakan akan berdampak positif bagi lokasi yang dituju melihat ekonomi di Indonesia yang sentralistis di Pulau Jawa. Dampak positif dari pemindahan ibu kota adalah tercapainya pemerataan ekonomi, dan transfer ekonomi akan berdampak pada keterkaitan internal dan eksternal. Pembangunan ekonomi internal akan mempengaruhi perkembangan wilayah kepulauan selain Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua, sedangkan pembangunan ekonomi eksternal lebih banyak mengenai kerjasama luar negeri antar wilayah di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Taufiq, 2020).

Dalam penelitian Reni Ria Armayani Hasibuan (2020) yang berjudul **“Dampak dan Risiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia”** menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan suatu rencana nasional yang dalam proses perencanaannya perlu di rencanakan dengan matang dengan melihat dampak dan risiko akan terjadi. Perpindahan ibu kota negara juga perlu memperhatikan aspek sosial budaya selain dari pada aspek geografi dan ekonomi. Dalam menentukan ibu kota negara yang ideal dari sudut pandang geografis, harus mempertimbangkan faktor spasial, ekologi, dan kewilayahan, seperti lahan yang sesuai, lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, bebas bahaya dan bencana, dan aspek lainnya yang sejalan dengan kota berkelanjutan (Hasibuan & Aisa, 2020).

Menurut penelitian Dadang Ilham Kurniawan Mujiono dan uni W. Sagen (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **“Opportunities of Internasional**

Cooperation in Relocating the New Capital of Indonesia” yang menggunakan penelitian deskriptif prediktif dengan fokus pembahasan yaitu berfokus pada peluang kerja sama internasional dalam pembangunan IKN Indonesia menemukan bahwa peluang kerja sama untuk pemindahan ibu kota negara yang kemudian di namakan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur memberikan potensi yang besar terhadap kerja sama internasional yang dalam bentuk skema bilateral, trilateral dan bahkan regional kerja sama juga dapat berbentuk bantuan keuangan, investasi, infrastruktur, teknologi dan tenaga kerja (Ilham et al., 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rini Rachmawati, Eko Haryono, Rizki Adriadi Ghiffari, Reinhart, Farah Dewi Permatasari, dan Amandita Ainur Rohmah (2021) yang berjudul *”Best Practices of Capital City Relocatioan in Various Countries: Literature Review”* menerangkan beberapa latar belakang negara-negara yang telah melakukan pemindahan ibu kota negara atau pemisahan antara pusat pemerintah dan pusat kota. Ada dua negara yang difokuskan dalam penjelasan penelitian yaitu perpindahan Ibu Kota Myanmar dan Malaysia. Latar belakang dari permasalahan dari kedua negara tersebut tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada di Indonesia yaitu permasalahan lingkungan, polusi, UHI yang berbeda signifikan, urbanisasi, bencana dan perlunya lokasi yang sentral secara geografis untuk penataan ibu kota negara. Pelajaran yang perlu diambil oleh Myanmar dan Malaysia yaitu perencanaan pembangunan ibu kota negara harus meliputi aspek Information dan Communication Technology (ICT), pembangunan sosial, wilayah serta aspek fisik dan lingkungan. Dari proses pembangunan tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian adalah infrastruktur yang dilakukan perlu memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat (Rachmawati et al., 2021).

Dalam penelitian Farida (2021) yang berjudul *”Indonesia’s Capital City Relocation: A Prespective of Regional Planning”* memfokuskan penelitiannya pada pengkajian pemindahan ibu kota dari sudut pandang perencanaan wilayah yang menyangkut kelembagaan, tata ruang, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Penyusunan tata ruang perlu memperhatikan prinsip tata ruang yang efisien, efektif dan proporsional untuk mendukung penataan ruang yang terpadu dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, pengambil keputusan serta pihak-pihak yang berdampak harus dilibatkan untuk koordinasi dan kerja sama dapat bersinergi dengan baik. Peneliti menemukan bahwa dari aspek tata ruang yang meliputi perekonomian khususnya di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berpotensi memiliki ekonomi yang meningkat melihat pertumbuhan ekonomi di Penajam Paser Utara pertumbuhan ekonominya hanya 4,36% yang berarti terendah kedua di Kalimantan Timur sedangkan PDRB Kutai Kartanegara 8,49% angka tersebut angka yang tertinggi dari total PDRB Provinsi Kalimantan Timur namun dengan potensi lahan dan proses pembangunan infrastruktur IKN dapat memaksimalkan potensi meningkatnya ekonomi di sekitar IKN tersebut. Kedua dari aspek kelembagaan dinilai menjadi hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendorong pertumbuhan, dengan mediasi oleh faktor kelembagaan akan fasilitasi masukan modal yang efektif akan mencapai perkembangan yang lebih baik. Kualitas kelembagaan khususnya dalam pemerintahan akan sangat berpengaruh pada inovasi dalam penentuan kebijakan publik dan tata kelola ekonomi politik. Bank dunia menetapkan enam indikator melihat kualitas pemerintahan yaitu suara dan akuntabilitas, kedua stabilitas politik, ketiga efektivitas pemerintahan, keempat kualitas regulasi, kelima supremasi hukum dan keenam pemberantas korupsi. Keputusan untuk merelokasi ibu kota menentukan karakter dan perkembangan ibu kota baru yang merupakan ruang diperebutkan secara halus dan proses perkotaannya tidak terdistribusi secara merata di antara warganya. Dengan pengelolaan yang kurang maksimal tidak dapat dipungkiri bahwa nasib kota baru akan ditentukan oleh jumlah warga yang mempunyai kekuasaan, baik dalam status sosial, sumber daya ekonomi, atau pengaruh politik. Ketiga penataan ruang strategi penataan ruang harus dilakukan secara cermat untuk mendukung kota yang cerdas, modern, mengikuti pengembangan teknologi serta memiliki ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berinovasi. Penataan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan dengan segala dampak eksternalitas terhadap perubahan fisik lingkungan. Menurut peneliti perencanaan tata ruang daerah pinggiran perlu dimasukkan dalam perencanaan tata ruang dengan penyesuaian daerah guna untuk menciptakan perekonomian yang beragam dan pemberdayaan perekonomian masyarakat selain

itu perencanaan tata ruang fisik perlu mempertimbangkan kearifan lokal yang ada. Keempat aspek sosial dan lingkungan peneliti menekankan bahwa mitigasi bencana dan permasalahan lingkungan harus diantisipasi sejak awal. Dengan kondisi lingkungan Kalimantan yang menjadi bagian dari paru-paru dunia sehinggaantisipasi kebakaran hutan dan bencana lainnya perlu menjadi pertimbangan pemerintah oleh karena itu pemindahan ibu kota memerlukan dokumentasi rencana mitigasi dampak ekosistem sebelum dan sesudah terjadi. Selain persoalan lingkungan hidup, potensi persoalan sosial juga merupakan salah satu perhatian dalam perencanaan pemindahan ibu kota. Urbanisasi akan berpotensi mengakibatkan konflik sosial dipicu kecemburuan sosial akibat permasalahan kesenjangan ekonomi. Asimilasi sosial budaya antara pendatang dengan penduduk lokal diperlukan antisipasi untuk pengurangan konflik sosial, selain itu permasalahan sosial yang perlu menjadi perhatian juga yaitu gelandangan dan pengangguran. Kesenjangan SDM menjadi salah satu penyebab persaingan pendatang dan masyarakat lokal, dinilai bahwa umumnya pendatang dari Jakarta memiliki keunggulan kualitas dibandingkan dengan penduduk lokal dikarenakan fasilitas antara Jakarta dan penduduk lokal jauh berbeda sehingga menurut peneliti pembangunan suatu daerah harus melibatkan penduduk setempat (Farida, 2021).

Dalam penelitian H.M Yahya (2018) yang berjudul **“Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”** menghubungkan pemisahan pusat pemerintahan atau pemindahan ibu kota negara dengan masa kerajaan, beberapa kerajaan yang di contohkan oleh penulis yaitu seperti Majapahit dengan peninggalan Trowulan yang menjadi pusat pemerintahannya; Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya. Penelitian ini menemukan hipotesis sementara bahwa pemindahan ibu kota adalah suatu hal yang urgen dilakukan dengan secara bertahap atau kedua yaitu ibu kota negara tetap berada pada di Jakarta namun diperlukan pemindahan beberapa departemen serta pusat kegiatan di luar Jawa. Dikatakan bahwa sebagai kepala negara kajian tentang pemindahan IKN perlu dilakukan dengan melihat beban lingkungan Jakarta sebagai perhitungan kelayakan sebagai ibu kota negara (H.M. Yahya, 2018).

Dalam penelitian Sundawan Salya (2022) yang berjudul **“Moving the National Capital (IKN) from the Strategic Intelligence Approach”** berfokus pada

melihat bagaimana pendekatan intelijen strategis memandang dinamika perpindahan ibu kota negara secara multiaspek dan multispektral untuk kajiannya sendiri membagi beberapa aspek dalam penelitiannya seperti aspek sosial dan budaya; aspek politik; aspek ekonomi; aspek pertahanan dan keamanan; aspek geografis dan penanggulangan bencana; dan aspek transportasi dan logistik. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Sundawan Salya hampir sama dengan penemuan-penemuan sebelumnya yang perlu memperhatikan berbagai aspek dan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan ibu kota negara namun di sisi lain ada penekanan yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu selain pertimbangan aspek-aspek yang dijelaskan di atas, berdasarkan analisis perspektif intelijen strategis diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk memaksimalkan dan memanfaatkan peluang yang ada di IKN untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu dalam pemaksimalan tersebut perlu pelibatan kementerian dan lembaga negara lain setingkat kementerian seperti Lemhanas dan/atau BIN agar dapat memberikan saran, pertimbangan, dan analisis kebijakan kepada pemerintah. Hal ini penting agar banyak aktor *check and balance* yang dapat berkontribusi secara komprehensif terhadap kebijakan yang berdampak nasional (Salya, 2022).

Dalam penelitian Nyimas Latifah Letty Aziz (2019) yang berjudul **“Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain / Relocation of Capital City: Lesson Learned From Other Countries”** menemukan bahwa Terdapat 57 contoh negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya atau mengurangi pusat pemerintahan, dan 17 di antaranya tergolong berhasil atau cukup berhasil. Berbagai skenario yang ditawarkan memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap kemajuan suatu negara dari segi faktor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya. Ada tiga poin penting dari pengalaman sukses dan gagal suatu negara yang melakukan relokasi: pertama, memiliki ekosistem pemerintahan yang lebih baik; kedua, keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik antar wilayah, yang berakibat pada keseimbangan antar wilayah; dan ketiga, keberlanjutan keunggulan kompetitif suatu negara/bangsa dalam skala global.

Dampak positif dari pemindahan ibu kota negara bagi Indonesia adalah dapat meningkatkan perekonomian lokal dan nasional, mengurangi pengangguran, dan pembangunan bertahap yang mengarah pada pemerataan pembangunan.

Sedangkan dampak negatif modal sendiri bagi Indonesia adalah risiko meningkatnya beban utang dan mendorong inflasi (jika pembangunan IKN terhenti). Pada akhirnya ada dua pilihan, yakni relokasi atau tidak. Sementara itu, mengingat Jakarta tetap menjadi ibu kota, maka perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan lingkungan hidup di sekitar Jakarta serta peninjauan tata ruang untuk menata Jakarta sebagai kota layak huni, namun jika pilihannya tetap dilanjutkan dengan relokasi, maka perlu dilakukan kehati-hatian. memperhatikan penggunaan dana yang digunakan dan meninjau perencanaan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik, infrastruktur, modernisasi dan lingkungan hidup serta mempersiapkan antisipasi risiko yang ada di masa yang akan datang (Aziz, 2019).

Hasil penelitian Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo (2021) yang berjudul **“Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha”** menilai bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi secara besar-besaran. Pemindahan ibu kota merupakan taktik yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia karena terkonsentrasinya perekonomian di Pulau Jawa menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Menelaah penyebab pengalihan IKN, dampaknya terhadap pemulihan ekonomi yang berkeadilan, dan peran undang-undang persaingan usaha, seperti tender pada tahap pengembangan IKN, menjadi pokok bahasan utama dalam studi ini. Peneliti menemukan, pemindahan ibu kota negara berdampak signifikan terhadap tata cara penawaran IKN pembelian barang dan jasa. Selain itu, pelaku usaha juga akan terkena dampak pengalihan IKN. Sejalan dengan arahan peraturan perundang-undangan yang melarang praktek monopoli dan usaha tidak sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Inovasi dalam kebijakan yang mempertimbangkan teknologi akan mempercepat laju ekspansi dan pemulihan ekonomi. Peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha sangat penting dalam upaya menggerakkan IKN, khususnya dalam proses tender, karena persaingan tender yang tidak sehat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan modal negara. Untuk memastikan bahwa kajian tender mempunyai pengaruh terhadap pemulihan ekonomi di seluruh

Indonesia, maka kajian tender sangatlah penting untuk dilakukan dan KPPU memainkan peran penting dalam hal ini (Pribadi & Utomo, 2021).

Berdasarkan penelitian di atas, bahwa perencanaan pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan memiliki dampak positif yang meliputi aspek ekonomi, infrastruktur, lingkungan dan sosial namun perlu diketahui bahwa perencanaan pemindahan IKN merupakan perencanaan nasional yang akan berdampak pada arah pengembangan Indonesia sehingga perencanaan pembangunan IKN perlu perencanaan tata ruang yang matang dengan meliputi aspek sosial dan budaya; aspek politik; aspek ekonomi; aspek infrastruktur; aspek lingkungan yang sehat; aspek ICT; aspek pertahanan dan keamanan; aspek geografis dan penanggulangan bencana; dan aspek transportasi dan logistik. Dengan perencanaan yang matang dengan meliputi aspek di atas dinilai akan membawa dampak positif pada Indonesia ke depannya tentunya dengan pengawasan yang ketat dan akuntabel. Adapun pembeda penelitian terdahulu penelitian di atas yaitu dari segi pendekatan dan fokus kajian, di mana peneliti terdahulu masih sedikit yang menjelaskan secara spesifik pengaruh IKN terhadap pembangunan keberlanjutan oleh karena itu kajian ini memfokuskan melihat pembangunan IKN dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada aspek keberlangsungan lingkungan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pembangunan

Menurut terminologi pembangunan yang meliputi modernisasi, industrialisasi, pemberdayaan, westernisasi, ekspansi ekonomi, europianisasi, dan transformasi politik. Pembangunan adalah proses pertumbuhan dan perubahan; dalam konteks ini mengacu pada kemajuan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nasional. Menurut Siagian (2001) dalam (Afandi, Syed Agung. Afandi, Muslim. Erdayani, 2022) Pembangunan adalah rangkaian inisiatif pertumbuhan dan transformasi yang direncanakan negara yang bertujuan untuk mencapai modernitas dalam kerangka pembangunan bangsa. Menurut Siagian, pembangunan terdiri dari enam komponen utama: (1) proses yang berkelanjutan; (2) upaya terencana dan berkesinambungan; (3) berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (4) menuju modernitas; (5)

multidimensi; dan (6) proses pembangunan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional dan negara sesuai dengan rumusan rencana yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan itu Tjokominoto dalam Suryono (2010) (Afandi, Syed Agung. Afandi, Muslim. Erdayani, 2022) memaknai pembangunan sebagai proses perubahan yang direncanakan secara sadar dan secara lembaga untuk bisa membangun kehidupan yang lebih layak.

Lebih lanjut, pembangunan dinilai sebagai salah satu tawaran solusi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hakikat dari pembangunan itu sendiri menurut S. A. Afandi & Afandi, (2019) dalam (Afandi, Syed Agung. Afandi, Muslim. Erdayani, 2022) yaitu sebuah proses multifaset yang melibatkan penyesuaian signifikan terhadap lembaga-lembaga nasional, struktur masyarakat, dan sikap individu serta ekspansi ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan penghapusan kemiskinan absolut. Pembangunan harus bertujuan untuk mencapai tiga tujuan: pertama, meningkatkan ketersediaan dan memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang adil terhadap kebutuhan dasar (pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan); kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat (pendapatan, kesempatan kerja yang sesuai, peningkatan pendidikan, serta nilai-nilai budaya dan kemanusiaan); dan ketiga, memperluas jangkauan perekonomian dan masyarakat. Perkembangan sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam untuk sangat menentukan keberlanjutan pembangunan. Mengingat bahwa pembangunan sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan atau pemanfaatan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Sumber Daya Manusia

Faktor yang selanjutnya yang bersentuhan langsung dengan perkembangan pembangunan adalah sumber daya manusia. Manusia sebagai pelaku utama pembangunan, menjadi landasan penting sehingga perlu dioptimalkan antara kuantitas dan kualitasnya.

3. Permodalan

Sumber daya modal yang cukup memberikan landasan bagi pertumbuhan. Sumber daya, yang lebih berharga daripada bahan mentah dan dapat digunakan

langsung oleh masyarakat, sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk menjamin sumber daya alam mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menunjang kinerja pembangunan, diperlukan investasi untuk eksplorasi dan pengolahannya.

4. Lapangan Kerja

Salah satu permasalahan yang tampaknya disebabkan oleh ketimpangan pertumbuhan adalah komponen lapangan kerja. Pembangunan mempengaruhi lapangan kerja, dan lapangan kerja akan memperoleh manfaat dari pembangunan yang baik.

5. Keahlian dan Kewirausahaan

Dibutuhkan kemampuan tertentu untuk mengubah sumber daya mentah menjadi barang jadi dengan manfaat yang luas. Di sisi lain, keahlian saja tanpa semangat kewirausahaan tidak akan mampu mengatasi permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, agar pertumbuhan suatu negara berhasil, warga negaranya harus memiliki bakat dan jiwa kewirausahaan

6. Stabilitas Politik

Stabilitas politik berpengaruh pada kondisi suatu negara termasuk perencanaan, kebijakan, dan juga pembangunan. Dengan kondisi politik yang tidak stabil akan saling menjatuhkan satu sama lain tanpa memikirkan kondisi suatu bangsa atau negara ke depannya. Oleh karena itu kestabilan politik, persatuan politik serta dukungan dari politik akan sangat berguna untuk kelancaran dan keefektifan dari suatu pembangunan.

7. Kebijakan Pemerintah

Perencanaan dengan dasar hukum yang tidak jelas atau perencanaan yang tidak disahkan oleh kebijakan akan menjadi suatu rencana. Kebijakan merupakan suatu pengesahan dari perencanaan atau pembangunan dalam proses selanjutnya. Peran pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa sangat ditentukan oleh decision making oleh pemerintah termasuk terhadap pada pembangunan (Yamin & Haryanto, 2017).

Oleh karena itu, dalam mencapai kesejahteraan serta sesuai dengan yang diharapkan, pembangunan perlu didukung penuh oleh peran pemerintah. Pemerintah merupakan kontrol dalam mengarahkan orientasi pembangunan

sehingga sesuai dengan perkembangannya pemerintah harus sesuai dengan poros pembangunan.

2.2.1.1 Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Disebutkan Siagian (2001) (Afandi, Syed Agung. Afandi, Muslim. Erdayani, 2022) peran pemerintah dalam proses pembangunan harus yaitu sebagai berikut :

1. Stabilisator

Pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat, secara tanggung bertugas sebagai mestinya untuk keamanan dan kemajuan bangsa. Untuk salah satu tugasnya adalah sebagai stabilisator untuk masyarakatnya. Dengan kehidupan masyarakat yang stabil maka dapat melaksanakan pembangunan yang efektif yang bertujuan untuk kesejahteraan.

2. Katalisator

Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk membantu pelaksanaan perubahan yang baik dan, di sisi lain, mengidentifikasi perubahan apa pun yang berdampak buruk dan mengambil tindakan yang tepat terlebih dahulu.

3. Modernisator

Tujuan modernisasi adalah menjadikan suatu bangsa kuat, mandiri, dan kompetitif. Pemerintah sekarang menggunakan modifikasi ini sebagai panduan untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mendukung perolehan pengetahuan, memiliki kemampuan administratif, mampu mengelola sumber daya alam, memiliki dasar demokrasi yang kuat dalam aktivitas politik, serta memiliki visi dan tujuan yang jelas.

4. Kepeloporan

Pemerintah sebagai karakter inti dalam negara, pemerintah bukan hanya sekedar sosialisasi ataupun memerintah kepada masyarakat melainkan menjadi pelopor utama dalam segala hal untuk mendukung kebijakan dan pembangunan.

5. Orientasi kerja

Pencapaian tujuan negara harus menjadi fokus seluruh inisiatif pemerintah. Tujuan utama suatu negara masih jauh dan pada dasarnya tidak terbatas,

namun sumber dayanya selalu terbatas, oleh karena itu pemerintah harus memberikan penekanan pada tenaga kerja yang mendorong produksi.

2.2.1.2 Pendekatan Pembangunan

Adapun dalam pengukuran pembangunan dijelaskan oleh Budiman (2000) dalam buku Pengantar Teori Pembangunan (Afandi, Syed Agung. Afandi, Muslim. Erdayani, 2022) bahwa terdapat lima pendekatan yang digunakan untuk mengukur pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Kekayaan rata-rata

Ketika suatu kota memiliki pertumbuhan ekonomi yang memadai, pembangunan dianggap berhasil. Hal ini dapat dihitung dengan membagi produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik bruto (PDB) dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan produktivitas rata-rata setiap individu di suatu negara.

2. Pemerataan

Metode ini menantang metode-metode yang menentukan kesuksesan suatu negara hanya dengan melihat output dari warga negaranya. Konsep ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang tidak memiliki akses terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin akan terus hidup dalam kemiskinan, sementara sebagian kecil orang dapat memperoleh manfaat dari kemakmuran rata-rata. Oleh karena itu, strategi ini menyoroti betapa pentingnya mendistribusikan manfaat kemajuan ekonomi secara adil. Metode ini melihat persentase GNP yang dinikmati oleh kelas menengah, persentase yang dinikmati oleh 40% penduduk miskin, dan persentase yang dinikmati oleh 20% penduduk kaya. Jika disparitas terus terjadi, tujuan negara untuk mencapai kesetaraan akan dianggap tidak tercapai

3. Kualitas hidup

Metode ini menekankan kesejahteraan penduduk selain mengukur pembangunan dari sudut pandang ekonomi. Pandangan Moris, yang menetapkan PQLI (Indeks Kualitas Fisik) dan menilai tiga indikator—rata-rata harapan hidup, rata-rata jumlah kematian neonatal, dan rata-rata presentasi melek huruf—merupakan salah satu standar yang

digunakan. Terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk di negara-negara berkembang ketika ukuran ini dibandingkan.

4. Kerusakan lingkungan hidup

Menurut strategi ini, kemajuan ekonomi dan kesetaraan saat ini tidak ada artinya jika mengorbankan lingkungan hidup. Generasi mendatang akan terkena dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Peradaban di masa depan akan menjadi lebih miskin karena kapasitas lingkungan untuk mendukung kebutuhan manusia menurun. Strategi ini sangat menekankan perlindungan lingkungan hidup sebagai komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan.

5. Keadilan sosial dan kesinambungan

Strategi ini mengintegrasikan dua strategi pendekatan keadilan dan lingkungan hidup yang sebelumnya tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Menurut metode ini, sejauh mana kesetaraan dapat dicapai dengan tetap menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi barometer keberhasilan pembangunan.

Pembangunan berorientasi kesejahteraan masyarakat. Sukirno (1985) dalam (Putri & Wulandari, 2022) menjelaskan bahwa pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mencirikan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan salah satu ukuran seberapa baik pembangunan berlangsung di suatu lokasi. Isu-isu pembangunan tidak hanya mencakup perspektif kemiskinan dan ekspansi ekonomi, namun juga mencakup isu-isu sosial. Indikator lain, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan, dapat digunakan untuk menilai seberapa baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Todaro et al. (2006) dalam (Putri & Wulandari, 2022) menyebutkan bahwa salah satu tujuan inti pembangunan ekonomi adalah terbentuknya pemerataan.

2.2.1.3 Pembangunan Berkelanjutan

Menurut laporan Brundtland tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi

mendatang” (UNESCO, 2011, hal. 1). Menurut konsep ini, kemajuan harus meningkatkan kualitas hidup setiap orang, baik saat ini maupun di masa depan. Ada tiga pilar yang mendukung gagasan pembangunan berkelanjutan: pembangunan harus berkelanjutan secara ekologis, adil secara sosial, dan sukses secara komersial. Strategi pembangunan berkelanjutan bersifat lengkap (holistik) karena mengintegrasikan ketiga unsur tersebut (Widjajanti, Darwina Matakupan, Stien j, Didha, Robert J, Martan, Dwi, & Hidayat, 2014).

Program pembangunan berkelanjutan dunia, menekankan pada tiga tiang utama dalam program yang difokuskan pada pembangunan yang berlatar belakang lingkungan hidup, kondisi sosial serta ketahanan ekonomi. Lima tujuan pilar pembangunan sosial adalah menyediakan pendidikan inklusif dan berkualitas tinggi, memberantas kelaparan, mengakhiri kemiskinan, dan mencapai kesetaraan gender. Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan: mengembangkan infrastruktur yang kuat, menurunkan kesenjangan antar dan antar negara, menyediakan akses energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menjamin penyediaan layanan air dan sanitasi. Enam tujuan yang menjadi pilar pembangunan lingkungan hidup adalah: memastikan air bersih dan sanitasi yang layak; mengelola dampak perubahan iklim; mengembangkan kota dan permukiman secara berkelanjutan; konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Terbentuknya pilar-pilar hukum dan tata kelola untuk mengarahkan arus aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam konteks keseluruhan pemeliharaan “Good Governance”. Metadata Indikator SDG Agenda Global 2015–2030 memberikan gambaran umum mengenai empat pilar pembangunan, yang selanjutnya dipecah menjadi 169 tujuan dan 320 indikator (Salim, 2021).

Rencana dunia untuk menjaga kestabilan ekosistem dan kehidupan dengan 17 program utama dan akan berakhir pada 2030 dikenal dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs), kependekan dari Targeted Prosperity Goals (TPBs), dan didasarkan pada Peraturan Presiden nomor

111 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Prestasi (Presiden Republik Indonesia, 2022b). Pasal 2 ayat 2 selanjutnya menyatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk:

1. Memelihara kesejahteraan perekonomian masyarakat
2. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan
3. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif
4. Menerapkan tata kelola yang dapat terus meningkatkan standar hidup dan mewariskannya kepada generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang mempunyai pandangan jangka panjang, dan bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan dengan menjaga ketersediaan sumberdaya alam. Gagasan ini muncul sebagai hasil pemahaman terhadap struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang berpusat pada kepentingan ekonomi. Pemikiran ini didasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan harus mengikuti prinsip perencanaan infrastruktur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa karakteristik geografis regional dari pembangunan berkelanjutan, diantaranya (Mulyadi et al., 2015):

1. Mengurangi kemiskinan. Ini adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan saat ini. Degradasi lingkungan hidup dan dampak buruk pembangunan sebagian disebabkan oleh kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan bisa saja muncul dan menyebar akibat menurunnya daya dukung ekosistem.
2. Pola Produksi dan Konsumsi. Salah satu sumber utama degradasi lingkungan adalah pola konsumsi kebutuhan pokok dan gaya hidup melalui pola produksi yang tidak berkelanjutan. Tidak adanya regulasi yang mendorong praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan secara khusus. Di wilayah metropolitan, telah muncul budaya konsumen dimana konsumsi kini didorong oleh simbol, visual, atau gambar, bukan nilai utilitas.
3. Dinamika Kependudukan. Memahami interaksi antara populasi dan faktor lingkungan, serta hubungan antara pembangunan berkelanjutan,

merupakan tujuan perencanaan pembangunan. Dengan menurunkan angka kelahiran, upaya ini bertujuan untuk mengatasi penipisan sumber daya alam dan menciptakan keseimbangan lingkungan dan populasi di dalam dan/atau antar wilayah.

4. Manajemen dan Peningkatan Kesehatan. Hal ini penting karena faktor lingkungan dan sosial ekonomi mempunyai dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kaitan antara pembangunan sosio-ekonomi dan kualitas lingkungan bersifat timbal balik; kadang-kadang, hal-hal yang disebutkan pertama akan berdampak pada hal-hal yang kedua, dan kesehatan yang dianggap sebagai sumber daya fundamental pembangunan akan berdampak pada proses pembangunan itu sendiri. Memastikan masyarakat memiliki akses terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang cukup sangat penting bagi kesehatan mereka.
5. Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Tempat tinggal manusia akan mendominasi pemanfaatan ruang wilayah seiring dengan terus berkembangnya dinamika populasi. 40% hingga 60% dari suatu komunitas, baik perkotaan maupun pedesaan, akan terdiri dari kawasan pemukiman.
6. Pentingnya proses partisipatif merupakan salah satu komponen kunci pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya peran masyarakat dan kelompok minoritas di dalamnya, dibandingkan hanya dilihat sebagai hasil karya sekelompok kecil teknokrat atau pembuat kebijakan. Oleh karena itu, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam memutuskan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mencapainya merupakan komponen kunci dari penekanan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal sustainable development adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana

memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. “Lingkungan” adalah tempat kita semua hidup, sedangkan “pembangunan” adalah apa kita semua lakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia (Warlina, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lebih detail lagi. Sebagai contoh adalah prinsip berkelanjutan yang diambilkan dari Robinson dkk. (1990) dalam Mitchell (2000) prinsip lingkungan/ekologi merupakan sebagai berikut:

1. Melindungi sistem penunjang kehidupan;
2. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik;
3. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menetapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak; dan
4. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global

2.2.2 Perencanaan

Dalam bukunya Prinsip Manajemen, Harold Koontz dan Cyril O. Donell menggambarkan perencanaan sebagai "persiapan terorganisir dari bisnis apa pun yang mewujudkan/mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan"(Nina Winangsih Syam, 2014). Harold Koontz mengemukakan sejumlah proses yang harus dilalui untuk bisa merencanakan sebuah program, diantaranya:

a. Menentukan tujuan

Tujuan ini sering kali ditetapkan sejak awal perusahaan, diputuskan di tingkat tertinggi, dan kemudian diputuskan juga di tingkat bawah organisasi. Menetapkan tujuan sejak awal suatu perusahaan sangatlah penting karena memberikan petunjuk atau kunci tentang apa yang harus diprioritaskan dan apa yang perlu dicapai melalui pembuatan aturan, proses, anggaran, dan program.

b. Menetapkan premis-premis

Mudah dikatakan bahwa premis menyajikan gambaran kondisi yang diproyeksikan atau diharapkan terjadi pada saat itu. Premis merupakan suatu jenis prediksi mengenai realitas atau kondisi kebijakan yang mungkin akan diambil di masa yang akan datang. Setelah gambaran diperoleh, segala perencanaan difokuskan pada strategi yang telah digariskan. Anggapan tersebut didukung oleh fakta, kebijakan fundamental, dan proyeksi. Tiga jenis tempat perencanaan dapat dibedakan:

1. Premis yang Tidak Dapat Dikendalikan: merupakan anggapan yang tidak mungkin dikuasai atau dikelola, seperti iklim politik yang ada, fluktuasi nilai uang, kebijakan keuangan pemerintah, dan sebagainya.
2. Tempat Semi-Terkendali: Ini adalah properti di mana beberapa aspek, seperti harga, produktivitas pekerja, dan pola lalu lintas, sebagian terkendali dan tidak dapat dikontrol sepenuhnya.
3. Konsep yang dapat dikontrol, atau dapat dipelajari atau dikendalikan. Tempat yang dapat dikontrol sepenuhnya berisi inisiatif dan kebijakan bisnis yang diputuskan oleh organisasi yang bersangkutan.

c. Mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang diambil.

Harold Koontz menegaskan bahwa karena sering kali ada tindakan yang mungkin dilakukan, perencanaan perlu mempertimbangkan semuanya. Artinya, perencanaan harus mencakup evaluasi terhadap beberapa cara yang mungkin diambil. Setiap pilihan yang mungkin diambil akan diperiksa dalam evaluasi ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta variabel-variabel yang mungkin mempengaruhinya, untuk menentukan tindakan terbaik. Setelah mengevaluasi semua pilihan yang ada, masuk akal bahwa salah satu dari pilihan tersebut mewakili jalan yang paling menguntungkan; namun, hal ini juga memerlukan investasi awal yang besar dengan periode pengembalian yang berlarut-larut. Sementara itu, jalur alternatif memberikan keuntungan lebih rendah namun risikonya lebih rendah. Sebelum memilih suatu tindakan, pilihan-pilihan ini perlu dipertimbangkan satu sama lain.

2.2.3 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah sikap Pemerintah dalam menangani suatu permasalahan. Adapun Para pakar memiliki berbagai pendapat dalam mendefinisikan pengertian kebijakan publik. Mulai dari definisi kebijakan publik yang memiliki cakupan luas maupun spesifik. Menurut Easton (1971:18) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah interaksi pemerintah dengan entitas konstituennya dan lingkungan hidup. Demikian pula Wilson (2006: 154) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau tujuan dan deklarasi mengenai isu-isu tertentu, tindakan yang telah (atau gagal) diambil untuk dilaksanakan baik dalam bentuk fisik maupun eksternal, termasuk klaim dari pemerintah atas apa yang telah dan akan terjadi.

W.I. Jenkins (1978:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh seorang aktor politik atau sekelompok pemain mengenai tujuan yang diinginkan dan metode untuk mencapainya. Sesuai dengan pandangan sebelumnya, Lemeiux (1995:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hasil tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang timbul dan ditentukan oleh aktor-aktor politik yang memiliki koneksi terorganisir. Proses tindakan ini terjadi setiap saat. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang sengaja dibuat oleh pemerintah dan pihak lain untuk mengatasi permasalahan masyarakat.

Thomas R. Dye (1978; 1987: 1) mengemukakan esensi kebijakan publik, yang ia gambarkan sebagai segala sesuatu yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena kebijakan publik merupakan substansi dan hakikat pemerintahan, maka harus dilaksanakan dan ditetapkan secara cermat guna menyelesaikan permasalahan publik yang ada. Dalam menyusun kebijakan publik, analisis publik harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil tepat sasaran dengan permasalahan yang ditangani.

2.2.3.1 Proses Kebijakan

Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang secara sepakat dijadikan sebagai acuan oleh sekelompok atau individu untuk bisa menyikapi polemik yang dihadapi (Winarno, 2002:16). Menurut William N. Dunn, terdapat sejumlah tahapan untuk bisa

menetapkan kebijakan publik, diantaranya: (Fatmariyanti, Yanti., Fauzi, 2023):

1. Langkah awal yaitu dengan merumuskan masalah yang dilakukan dengan memberikan data-data terkait dengan sumber permasalahan
2. Langkah kedua yaitu dengan melakukan ramalan terhadap potensi kejadian berdasarkan data yang dimiliki atas ditetapkan atau tidaknya sebuah kebijakan.
3. Langkah ketiga berupa pengusulan atau rekomendasi terhadap kebijakan dengan mengusulkan sejumlah data untuk pertimbangan kebijakan alternatif.
4. Langkah keempat yaitu prosedur pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dengan cara meninjau dampak yang dihasilkan dan mengkomparasikan dengan kondisi sebelumnya
5. Langkah terakhir berupa evaluasi atas kebijakan yang telah dilaksanakan.

Proses penentuan keputusan merupakan faktor penting dalam pengembangan suatu rencana. Menurut Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A, dalam bukunya yang berjudul “Analisis kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”, ada tiga jenis teori keputusan kebijakan: teori rasional komprehensif, teori inkremental, dan teori rasionalisasi komprehensif serta teori terpadu.

a) Teori Rasional Komprehensif

Komponen utama teori ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengambil keputusan dihadapkan pada situasi tertentu, yang dapat dibedakan dari permasalahan yang dapat diperbandingkan satu sama lain;
2. Sasaran dan nilai, atau tujuan yang memberikan nasihat bagi pengambil keputusan, sangat jelas dan dapat diprioritaskan berdasarkan kepentingannya.
3. Berbagai solusi terhadap masalah tersebut dipelajari secara mendalam.

4. Dampak (biaya dan manfaat) yang dihasilkan dari setiap alternatif yang dipilih dinilai.
5. Setiap pilihan dan konsekuensi yang terkait dapat dibandingkan dengan alternatif lain.
6. Pengambil keputusan akan memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang ditunjukkan.

b) Teori Inkremental

Inti dari teori inkremental dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan pengujian tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai hal yang paling berhubungan, bukan hal yang paling berbeda.
2. Para pengambil keputusan dianggap hanya menilai beberapa pilihan yang berkaitan erat dengan inti permasalahan, dan alternatif-alternatif ini hanya dianggap bertahap atau sedikit berbeda bila dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini;
3. Hanya beberapa dampak mendasar yang akan dinilai untuk setiap kemungkinan.
4. Tantangan yang dihadapi para pengambil keputusan akan didefinisikan ulang secara berkala. Konsep inkrementalisme memungkinkan adanya pertimbangan dan penyesuaian tujuan dan gagasan, serta metode dan tujuan, agar dampak masalah lebih dapat dikelola.
5. Tidak ada keputusan atau solusi yang tepat untuk setiap situasi. Landasan pengambilan keputusan yang berhasil adalah adanya gagasan bahwa banyak analisis pada akhirnya akan menyetujui suatu kesimpulan tertentu, bahkan jika keputusan tersebut bukan merupakan rekomendasi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan.
6. Pengambilan keputusan tambahan mengacu pada perubahan kecil. Hal ini terutama difokuskan pada

perbaikan kelemahan inisiatif-inisiatif tertentu untuk menyelesaikan permasalahan sosial saat ini, dibandingkan mengusulkan tujuan-tujuan sosial yang baru untuk masa depan.

c) Teori *mixed scanning* (Pengamatan Terpadu)

Teori pemindaian campuran merupakan teori yang muncul dari kritik terhadap teori keputusan sebelumnya, teori rasional komprehensif, dan teori inkremental. Amitai Etzioni, seorang sosiolog, mengembangkan teori ini. Ia mendefinisikan teori pemindaian campuran (*mixed scanning theory*) sebagai cara untuk menentukan arah kebijakan yang mempertimbangkan pilihan-pilihan tambahan dan menawarkan prioritas utama untuk proses inti pengambilan kebijakan, yang berfungsi untuk menetapkan pedoman penting dan prosedur pengambilan keputusan. Setelah pilihan-pilihan mendasar dibuat, tindakan-tindakan lain akan menentukan landasan bagi pilihan-pilihan tersebut.

2.2.3.2 Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan hal yang wajib dilakukan guna memaksimalkan pengaruh suatu kebijakan yang telah dikeluarkan. Para ahli kebijakan menggunakan berbagai metodologi untuk menganalisis isu-isu kebijakan, baik secara individu maupun kelompok.

William N. Dunn (2018) menggambarkan cara untuk menganalisis kebijakan dalam bidang ilmu sosial terapan yang menciptakan dan menyebarkan kebijakan terkait yang dapat digunakan secara politik untuk mengatasi masalah kebijakan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik penelitian, data, dan argumen (Fatmariyanti, Yanti, Fauzi, 2023).

2.2.3.3 Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

Menurut William Dunn (Fatmariyanti, Yanti., Fauzi, 2023), ada tiga jenis analisis kebijakan publik, yaitu sebagai berikut (N.Dunn, 2004):

1) Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif merupakan suatu metode untuk mengumpulkan informasi sebelum pelaksanaan kebijakan guna memberikan alternatif sebagai peruntukan dalam opsi lainnya yang dapat berguna dalam pencarian solusi terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas atas kebijakan pemerintah dan/atau organisasi.

2) Analisis Kebijakan Retrospektif.

Analisis kebijakan retrospektif diartikan sebagai proses menciptakan serta mentransformasikan data setelah diimplementasikan. Perumusan masalah, pemantauan (implementasi), dan penilaian merupakan tiga indikator yang digunakan untuk analisis kebijakan retrospektif. Termasuk berbagai tugas yang dibuat oleh tiga kelompok analisis, termasuk analisis berorientasi disiplin (berfokus pada disiplin) dan analisis berorientasi masalah.

3) Analisis kebijakan terpadu. Analisis kebijakan menggabungkan analisis prospektif dan retrospektif. Analisisnya berfokus pada transformasi kebijakan sebelum dan sesudah implementasi kebijakan.

Lebih spesifiknya, William Dunn memaparkan keberhasilan analisis pengambilan kebijakan yang dapat dilihat melalui tiga tahap, sebagai berikut:

1. Tahapan review kebijakan, termasuk teknik analisis kebijakan. Teknik yang dimaksud adalah seperangkat norma, aturan, dan proses untuk menghasilkan, mengevaluasi dengan mendalam serta menyampaikan informasi yang sejalan dengan arah kebijakan.

2. Tahapan pengambilan kebijakan dibagi menjadi lima siklus yang terjadi secara berkaitan, diantaranya: penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
3. Tahapan komunikasi kebijakan bertujuan memperbaiki langkah pengambilan kebijakan dan hasil-hasilnya, dengan mengacu pada pengembangan dan evaluasi kritis terhadap informasi yang relevan dengan kebijakan(Dunn, 2003).

2.2.3.4 Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Kebijakan publik biasanya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan pandangan para ahli, masuk akal untuk mendefinisikan kebijakan sebagai respon pemerintah atas kesulitan. Pemindahan IKN direkomendasikan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan pemerintahan. Kebijakan pemindahan ibu kota dituangkan dalam UU RI Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini menetapkan wilayah baru sebagai Ibu Kota Negara dan secara langsung memindahkan beberapa bagian dari jajaran pemerintahan sekaligus menjadi tempat menyelenggarakan urusan pemerintah tingkat pusat, yang mengacu pada:

Pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara berpedoman pada visi Ibu Kota Negara sebagai kota metropolitan dunia untuk semua orang, dengan tujuan akhir mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi rujukan (role model) bagi pengembangan dan pengelolaan kota-kota di Indonesia. dan di seluruh dunia. Visi besar tersebut bermaksud mewujudkan ibu kota nusantara sebagai:

1. Kota-kota berkelanjutan di dunia, yang menawarkan kenyamanan, keselarasan dengan lingkungan, dan ketahanan melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan karbon minimal
2. mendorong perekonomian Indonesia di masa depan, yang memberikan peluang ekonomi bagi semua orang melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; Dan

3. Tanda jati diri bangsa yang melambangkan perdamaian di tengah keberagaman, menurut Bhinneka Tunggal Ika.

Ibukota Kepulauan menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Identitas nasional: pusat kegiatan yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, keagungan bangsa, karakter sosial serta persatuan. IKN melambangkan kepribadian dan kemajemukan NKRI, yang mewujudkan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Smart, green dan sustainability adalah sebuah kota yang menawarkan pengelolaan sumber daya yang efektif, informasi yang tepat dan jelas, serta layanan terbaik kepada warganya. Hal ini dicapai dengan mengembangkan modal transportasi terpadu, mengolah sampah, menggunakan sumber daya air dan energi secara efisien, mengelola kegiatan sosial budaya dan ekonomi kota secara seimbang, merencanakan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan, dan membina kerjasama yang lebih besar antara alam dan buatan manusia.
3. Kota berstandar internasional: dengan kriteria kota yang mampu bersifat inovatif, efisiensi dalam hal tata kelola kota, mampu mengimplementasikan IPTEK, terintegrasi dan sifat dasar kota berstandar internasional lainnya.
4. Pemerintahan pusat yang menjalankan pemerintahan secara smart, tidak terpaku pada sistem birokrasi yang terlalu kaku, profesional, serta mampu memaksimalkan kemampuan serta potensi pegawai ASN.
5. Menjadi kebaruan dari perekonomian yang memperkuat rantai nilai internasional dan menciptakan bisnis yang kompetitif, berteknologi tinggi, bersih, dan bernilai tinggi di wilayah timur Indonesia untuk memajukan kesetaraan ekonomi.

6. Kota yang sehat, dimana seluruh warganya – baik laki-laki maupun perempuan merasa aman dan nyaman, dimana masyarakat rentan seperti bayi, balita, anak-anak, dan lainnya dilindungi, dan apabila fasilitas sosial dan umum tersedia untuk mendukung kebutuhan dan aktivitas seluruh anggota masyarakat dan keluarga.

